



Jln. Lareh Nan Panjang, Nomor 103-
Batusangkar Kode Pos 27218 Telp :
(0752) 72624
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

Batusangkar, 4 Mei 2026

Nomor : **B-50/KU.00/SB-12/05/2026**
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Audited Tahun 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Bukittinggi
Di

tempat

Dengan hormat,

Memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga dan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-86/PB/2026 dalam hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 (*Audited*) tanggal 6 April 2026, bersama ini kami menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA satuan kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dengan kode satker 686126. Adapun *softfile* Laporan Keuangan beserta dokumen pendukung sudah kami sampaikan melalui s.id/VeraKPPN011.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Tanah Datar**



HARMESYONI, S.Ag.,S.Pd
NIP. 19751118 200212 1 002



LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN AUDITED SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN
2025



KATA PENGANTAR

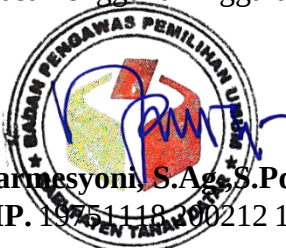
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun sebagai pertanggungjawaban atas semua tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batusangkar, 5 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran


Harnesyoni, S.Ag., S.Pd
NIP. 19751118-002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	vii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
II. NERACA	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	4
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM.....	7
A.1 Dasar Hukum	7
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Bawaslu	8
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4 Basis Akuntansi	9
A.5 Dasar Pengukuran	10
A.6 Kebijakan Akuntansi	10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	15
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah.....	16
B.2 Belanja	17
B.3 Belanja Pegawai.....	18
B.4 Belanja Barang	19
B.5 Belanja Modal.....	21
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	21
C.1 Utang Kepada Pihak Ketiga.....	23
C.2 Ekuitas	23
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	24
D.1 Beban Barang dan Jasa	24
D.2 Beban Pemeliharaan	25
D.3 Beban Perjalanan Dinas	25
D.4 Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	26
D.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	26
D.6 Surplus/Defisit LO.....	26
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	27

E.1.	Surplus (Defisit) LO	27
E.2.	Transaksi Antar Entitas.....	27
E.3.	Kenaikan dan Penurunan Ekuitas	28
E.4.	Ekuitas Akhir	28
F.	PENGUNGKAPAN LAINNYA	29
F.1.	Pengungkapan Pengembangan Organisasi	29
F.2.	Pengungkapan Lainnya.....	29
F.3.	Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).....	30
F.4.	Capaian Output	31
F.5.	Pengungkapan Program Prioritas Nasional	33
LAMPIRAN		34

DAFTAR TABEL

Tabel A.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	12
Tabel A.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	13
Tabel B.1 Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran	15
Tabel B.2 Daftar Revisi Pagu TA 2025	15
Tabel B.3 Rincian Revisi Pagu TA 2025	16
Tabel B.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025	16
Tabel B.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024	16
Tabel B.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025	17
Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024	18
Tabel B.8 Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2025	18
Tabel B.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025	19
Tabel B.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025	19
Tabel B.11 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024	20
Tabel B.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025	21
Tabel B.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024	21
Tabel B.14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024	22
Tabel C.1 Perbandingan Utang Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 2024	23
Tabel C.2 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2025	23
Tabel D.1 Perbandingan Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024	24
Tabel D.2 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Berdasarkan Akun per 31 Desember 2025	25
Tabel D.3 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024	25
Tabel D.4 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024	26
Tabel E.1 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 2024	27
Tabel E.2 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	27
Tabel E.3 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2025	28
Tabel F.1 Daftar Rekening Virtual Account Rupiah Murni per 31 Desember 2025	30
Tabel F.2 Matriks Perubahan Pejabat Perbendaharaan di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2025	30

Tabel F.3 Realisasi Anggaran dan Target Capaian Output TA 2025	31
Tabel F.4 Pengungkapan Program Prioritas Nasional	33



Jln. Lareh Nan Panjang, Nomor 103-
Batusangkar Kode Pos 27218 Telp :
(0752) 72624
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batusangkar, 5 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Harmesyoni, S.Ag.,S.Pd
NIP. 19751118 200212 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp190.682.994,00 atau mencapai 83,48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp228.430.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar: Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban sebesar Rp936.270,00 dan nilai Ekuitas sebesar (Rp936.270,00).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp191.619.264,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp191.619.264,00). Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) sebesar Rp0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp191.619.264,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp0,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp191.619.264,00) ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar R.190.682.994,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp936.270,00).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	2025		2024	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
PENERIMAAN PERPAJAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA				
BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA BARANG	228.430.000,00	190.682.994,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	228.430.000,00	190.682.994,00	0,00	0,00

Batusangkar, 5 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Harmesyoni, S.Ag., S.Pd
NIP. 19751118 200212 1 002

II. NERACA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

Uraian	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	Naik/ (Turun)%
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0,00	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP			
Peralatan Mesin	0,00	0,00	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISA SI ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00

Uraian	31 DESEMBER 2025 (Rp)	31 DESEMBER 2024 (Rp)	Naik/ (Turun)%
JUMLAH ASET	0,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	936.270,00	0,00	100,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	936.270,00	0,00	100,00
JUMLAH KEWAJIBAN	936.270,00	0,00	100,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	(936.270,00)	0,00	(100,00)
JUMLAH EKUITAS	(936.270,00)	0,00	(100,00)
JUMLAH EKUITAS	(936.270,00)	0,00	(100,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0,00	0,00	0,00

Batusangkar, 5 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Harmesyoni, S.Ag., S.Pd
NIP. 19751118 200212 1 002

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2025 DAN 2024

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	77.860.110,00	0,00	100,00
Beban Pemeliharaan	42.526.525,00	0,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	71.232.629,00	0,00	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	191.619.264,00	0,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(191.619.264,00)	0,00	(100,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	(%)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(191.619.264,00)	0,00	(100,00)
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	(191.619.264,00)	0,00	(100,00)

Batusangkar, 5 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Harmesyoni, S.Ag.,S.Pd
NIP. 19751118 200212 1 002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(191.619.264,00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	190.682.994,00	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(936.270,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	(936.270,00)	0,00

Batusangkar, 5 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Harmesyoni, S.Ag.,S.Pd
NIP. 19751118 200212 1 002

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2023 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Pemerintah Pusat.
16. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Nomor S-86/PB/2026 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 *Audited* tanggal 6 April 2026.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Bawaslu

Rencana Strategis Bawaslu

Menurut nomenklatur UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1, angka 15, Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga pengawas pemilu yang terpercaya”

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **terpercaya**, adalah sebagai berikut:

Terpercaya

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2021-2025.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Sasaran Bawaslu

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan keuangan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Semester II Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Muthlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06./2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Penyisihan tersebut didasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penghitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0.5 persen
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama dilakukan pelunasan	10 persen
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum dilakukan pelunasan	50 persen
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum dilakukan pelunasan	100 persen
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/DJKN	

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
- 5) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- 3) Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat
- 5) Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan bepedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	
Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

- d. **Piutang Jangka Panjang**
 - 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan
- e. **Aset Lainnya**
 - 1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraaan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
 - 4) Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

5) Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 2 (dua) kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyesuaian atas anggaran hibah dalam rangka pemilihan kepala daerah. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.1 Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran

Uraian	31 Desember 2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan:		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Total Pendapatan	-	-
Belanja:		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	228.430.000,00	228.430.000,00
Belanja Modal	-	-
Total Belanja	228.430.000,00	228.430.000,00

Berikut daftar revisi DIPA yang dilakukan selama periode semester II Tahun 2025:

Tabel B.2 Daftar Revisi Pagu TA 2025

No DIPA	Tanggal DIPA	Total Pagu
SP DIPA-115.01.2.686126/2025	02-Oct-25	228.430.000,00
SP DIPA-115.01.2.686126/2025	03-Nov-25	228.430.000,00
SP DIPA-115.01.2.686126/2025	10-Dec-25	228.430.000,00

Berikut alasan dilakukannya revisi sebagai berikut:

Tabel B.3 Rincian Revisi Pagu TA 2025

No DIPA	Tanggal DIPA	Uraian revisi
SP DIPA-115.01.2.686126/2025	02-Dec-24	Penetapan pagu
SP DIPA-115.01.2.686126/2025	03-Nov-25	Revisi DJA untuk efisiensi anggaran APBN
SP DIPA-115.01.2.686126/2025	10-Dec-25	Revisi KPA untuk pergeseran anggaran operasional

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasi pendapatan Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

Tabel B.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Total Pendapatan Kotor	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Perbandingan realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel B.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	-	-	0%
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	-	-	0%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	-	0%
Total pendapatan kotor	-	-	
Pengembalian pendapatan	-	-	-
Total	-	-	0%

B.2 Belanja

Realisasi belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp190.682.994,00 atau 83,48 persen dari anggaran belanja sebesar Rp228.430.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel B.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0,00%
Belanja Barang	228.430.000,00	190.682.994,00	83,48%
Belanja Modal	-	-	0,00%
Total Belanja Kotor	228.430.000,00	190.682.994,00	
pengembalian belanja	-	-	
Total Belanja	228.430.000,00	190.682.994,00	83,48%

Realisasi belanja untuk per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 83.48 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berdasarkan DJA Kementerian Keuangan Nomor S-480/AG/AG.5/2024 Tanggal 4 Oktober 2024 merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Satuan Kerja Baru yang sebelumnya masih berinduk di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang pecah DIPA tanggal 2 Oktober 2025 Nomor DIPA SP DIPA-115.01.2.686126/2025.

Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0,00%
Belanja Barang	190.682.994,00	-	100,00%
Belanja Modal	-	-	0,00%
Total Belanja Kotor	190.682.994,00	-	100,00%
pengembalian belanja	-	-	0,00%
Total Belanja	190.682.994,00	-	100,00%

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp190.682.994,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp190.682.994,00 dikurangi pengembalian belanja Rp0,00. Rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel B.8 Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Realisasi	Pengembalian belanja	Belanja Netto
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	190.682.994,00	-	190.682.994,00
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja	190.682.994,00	-	190.682.994,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja gaji dan tunjangan PNS	-	-	0.00%
Belanja gaji dan tunjangan pejabat negara	-	-	0.00%
Belanja gaji dan Tunjangan PPPK	-	-	0.00%
Belanja uang lembur	-	-	0.00%
Belanja tunj. Khusus & belanja pegawai transito	-	-	0.00%
Jumlah belanja kotor	-	-	0.00%
Pengembalian belanja pegawai	-	-	0.00%
Jumlah belanja netto	-	-	0.00%

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan kenaikan sebesar 0 persen.

B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp190.682.994,00 atau 83.48 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp228.430.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel B.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional	78.574.000,00	64.986.240,00	82,71%
Belanja Barang Non Operasional	5.055.000,00	4.619.000,00	91,37%
Belanja Persediaan	-	-	0,00%
Belanja Jasa	9.150.000,00	7.318.600,00	79,98%
Belanja Pemeliharaan	54.110.000,00	42.526.525,00	78,59%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	81.541.000,00	71.232.629,00	87,36%
Jumlah Belanja Kotor	228.430.000,00	190.682.994,00	83,48%
Pengembalian belanja	-	-	0,00%
Jumlah Belanja	228.430.000,00	190.682.994,00	83,48%

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp190.682.994,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dari realisasi belanja barang per 31 Desember 2024, disebabkan karena merupakan Satuan Kerja Baru yang pecah DIPA tanggal 02 Oktober 2025.

Tabel B.11 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Belanja Barang Operasional	64.986.240,00	-	100,00%
Belanja Barang Non Operasional	4.619.000,00	-	100,00%
Belanja Persediaan	-	-	0,00%
Belanja Jasa	7.318.600,00	-	100,00%
Belanja Pemeliharaan	42.526.525,00	-	100,00%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	71.232.629,00	-	100,00%
Jumlah Belanja Koto	190.682.994,00	-	100,00%
Pengembalian belanja	-	-	0,00%
Jumlah Belanja	190.682.994,00	-	100,00%

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp190.682.994,00 seluruhnya berasal dari rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Koordinasi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
2. Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan Kabupaten/Kota
4. Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota
5. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota
6. Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota
7. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
8. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota
9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
12. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota

Belanja barang sebesar Rp190.682.994,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja barang bruto sebesar Rp190.682.994,00 dikurangi pengembalian belanja barang sebesar Rp0,00. Tidak ada pengembalian belanja barang di Tahun 2025.

B.5 Belanja Modal

Realiasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00 atau 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel B.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian belanja	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Realiasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00 atau 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel B.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian belanja	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Realisasi belanja modal sebesar Rp0,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0 persen disebabkan karena tidak ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja modal.

Tabel B.14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Belanja modal peralatan dan mesin	-	-	0%
Belanja modal gedung dan bangunan	-	-	0%
Jumlah belanja kotor	-	-	0%
pengembalian belanja	-	-	0
Total	-	-	0%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp936.270,00 dan Rp0,00.

Tabel C.1 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	936.270,00	-

Utang kepada pihak ketiga pada Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2025 sebesar Rp936.270,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa yang masih harus dibayar sebesar Rp936.270,00 berasal dari tagihan Desember 2025 yang diterima di bulan Januari 2026 dan belum dilakukan pembayaran kepada penerima di tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.2 Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025

No.	Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
1	522113	Beban Langganan Air	96.000,00
2	521111	Beban Keperluan Perkantoran	840.270,00
Total			936.270,00

C.2 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar (Rp936.270,00) dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp0,00 dan kewajiban sebesar Rp936.270,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi beban modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp77.860.110,00 dan Rp0,00 dengan kenaikan sebesar 100%. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel D.1 Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	33.095.510,00	0,00	100%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9.156.000,00	0,00	100%
Beban Barang Operasional Lainnya	23.575.000,00	0,00	100%
Beban Bahan	4.619.000,00	0,00	100%
Beban Langganan Listrik	3.524.000,00	0,00	100%
Beban Langganan Air	290.600,00	0,00	100%
Beban Jasa Profesi	3.600.000,00	0,00	100%
Jumlah	77.860.110,00	0,00	100%

Kenaikan beban barang dan jasa pada TA.2025 dibandingkan dengan beban barang dan jasa pada TA.2024 terjadi karena berdasarkan DJA Kementerian Keuangan Nomor S-480/AG/AG.5/2024 Tanggal 4 Oktober 2024 merupakan Satuan Kerja Baru yang sebelumnya masih berinduk di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang pecah DIPA tanggal 2 Oktober 2025 Nomor DIPA SP DIPA-115.01.2.686126/2025.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada laporan realisasi anggaran (LRA) dibandingkan jumlah beban barang dan jasa pada laporan operasional (LO) per 31 Desember 2025. Berikut dapat disampaikan rincian hasil mutasi sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Barang dan Jasa (LRA) per 31 Desember 2025	Rp	76.923.840
Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp	936.270,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	77.860.110,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa (LO) per 31 Desember 2025	Rp	77.860.110,00

Penjelasan

1. Belanja barang dan jasa yang masih harus dibayar sebesar Rp936.270,00 berasal dari tagihan Desember 2025 yang diterima di bulan Januari 2026 dan belum dilakukan pembayaran kepada penerima di tahun 2025.

**Tabel D.2 Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
Berdasarkan Akun per 31 Desember 2025**

No.	Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
1	522113	Beban Langganan Air	96.000,00
2	521111	Beban Keperluan Perkantoran	840.270,00
Total			936.270,00

D.2 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam keadaan baik dari waktu ke waktu, sehingga dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp42.526.525,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%, dengan perincian perbandingan sebagai berikut:

**Tabel D.3 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.500.000,00	0,00	100%-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.026.525,00	0,00	100%
Jumlah	42.526.525,00	0,00	100%

D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk mencatat pengakuan yang dihitung berdasarkan ketentuan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp71.232.629,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%, dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

Tabel D.4 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	63.797.629,00	0,00	100%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.585.000,00	0,00	100%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	850.000,00	0,00	100%
Jumlah	71.232.629,00	0,00	100%

Kenaikan yang terjadi pada beban perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan beban perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2024 dikarenakan berdasarkan DJA Kementrian Keuangan Nomor S-480/AG/AG.5/2024 Tanggal 4 Oktober 2024 merupakan Satuan Kerja Baru yang sebelumnya masih berinduk di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang pecah DIPA tanggal 2 Oktober 2025 Nomor DIPA SP DIPA-115.01.2.686126/2025.

D.4 Surplus/Defisit – KEGIATAN OPERASIONAL

Defisit Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar (Rp191.619.264,00) dan Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100%).

D.5 Surplus/Defisit – SEBELUM POS LUAR BIASA

Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar (Rp191.619.264,00) dan Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100%).

D.6 Surplus/Defisit - LO

Defisit LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar (Rp191.619.264,00) dan Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (100%).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Surplus/Defisit LO

Jumlah surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp191.619.264,00 dan 00,00. Surplus/defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.2 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp190.682.994,00 dan Rp0,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel E.1 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Diterima dari Entitas Lain	0,00	0,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	190.682.994,00	0,00
Pengesahan Hibah Langsung	0,00	0,00
Total	190.682.994,00	0,00

Penjelasan:

1. Diterima dari Entitas Lain /Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain /Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp0,00.

Sedangkan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp190.682.994,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

Tabel E.2 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per 31 Desember 2025

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang	190.682.994,00
Belanja Modal	0,00
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00
Pengembalian Belanja Barang	0,00
Pengesahan Belanja Hibah	0,00
Total	190.682.994,00

E.3 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan dan penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp936.270,00) dan Rp0,00.

Tabel E.3 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas
per 31 Desember 2025

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(191.619.264,00)	0,00
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	190.682.994,00	0,00
Total	(936.270,00)	0,00

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp936.270,00) dan Rp0,00.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp0,00 ditambah penurunan ekuitas sebesar (Rp936.270,00).

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Inspektorat Utama.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar termasuk ke dalam Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten kelas B. Berikut disampaikan susunan struktur organisasi sesuai dengan SOTK tersebut:

1. Kepala Sekretariat; Harmesyoni, S.Ag.,S.Pd
2. Kepala Sub Bagian Administrasi; Beny Satria, S.E

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, Bawaslu sedang melaksanakan pemetaan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas untuk dapat disetarakan sebagai Jabatan Fungsional.

F.2 Pengungkapan Lainnya

1. Rekening Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga bahwa Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Rekening Pengeluaran adalah rekening pemerintah dalam bentuk giro pemerintah atau rekening virtual pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran negara.

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Rekening Virtual Account rupiah murni Bawaslu Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menampung dan menyalurkan dana APBN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel F.1 Daftar Rekening Virtual Account Rupiah Murni per 31 Desember 2025

No	Satuan Kerja	Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening
1	Kab. Tanah Datar	BNI	9890716861261000	BPG 011 BWS KAB TANAH DATAR

2. Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat nomor 35/KU.01.00/SB-12/11/2025 tentang pejabat pengelolaan keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, berikut disampaikan daftar pengelola keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar:

Tabel F.2 Matriks Perubahan Pejabat Perbendaharaan di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2025

NO	JABATAN	NAMA	Nomor SK
1	Kuasa Pengguna Anggaran	HARMESYONI, S.Ag.S.Pd	35/KU.01.00/SB-12/11/2025 Tanggal 3 Oktober 2025
2	Pejabat Pembuat Komitmen	HARMESYONI, S.Ag.S.Pd	35/KU.01.00/SB-12/11/2025 Tanggal 3 Oktober 2025
3	Pejabat Penandatangan/ Penguji SPM	BENY SATRIA SE	35/KU.01.00/SB-12/11/2025 Tanggal 3 Oktober 2025
4	Bendahara Pengeluaran	SEDKI AMEDA	35/KU.01.00/SB-12/11/2025 Tanggal 3 Oktober 2025

F.3 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah mengimplementasikan PIPK terhadap akun signifikan sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor B-148/KU.02/SJ/01/2026 tanggal 13 Januari 2026. Akun signifikan yang telah ditentukan yaitu:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah;
3. Peralatan dan Mesin; dan
4. Beban Perjalanan Dinas Biasa.

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan melakukan penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

F.4 Capaian Output

Selama semester II Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja kegiatan semester II Tahun 2025 adalah sebesar Rp190.682.994,00 dari anggaran sebesar Rp228.430.000,00.

Secara lengkap anggaran dan realisasi kegiatan beserta capaian output Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar disajikan sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA SEMESTER II TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Unit Organisasi : Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
Satuan Kerja : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Tabel F.3 Realisasi Anggaran dan Target Capaian Output TA 2025

Kode	Kegiatan	Belanja							Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota								
BAH	Pelayanan Publik Lainnya								
	001 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	200,000.00	178,500.00	89.25	1	1	(layanan)	100	
	<i>Subtotal</i>	200,000.00	178,500.00	89.25	1	1	(layanan)	100	
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga								
	001 Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	3,260,000.00	3,176,000.00	97.42	1	1	(Laporan)	100	
	<i>Subtotal</i>	3,260,000.00	3,176,000.00	97.42	1	1	(Laporan)	100	
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan								
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga								
	002 Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	11,180,000.00	9,561,500.00	85.52	1	1	(Laporan)	100	
	<i>Subtotal</i>	11,180,000.00	9,561,500.00	85.52	1	1	(Laporan)	100	

Laporan Keuangan Audited 686126 Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Unit Organisasi : Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
 Satuan Kerja : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
 Program : Dukungan Manajemen

Kode	Kegiatan	Belanja							Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal								
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
	961 Layanan Reformasi Kinerja	200,000.00	200,000.00	100	1	1	(Dokumen)	100	
	<i>Subtotal</i>	200,000.00	200,000.00	100	1	1	(Dokumen)	100	
4356	Pengelolaan Data dan Informasi								
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	963 Layanan Data dan Informasi	525,000.00	475,000.00	90.48	1	1	(Laporan)	100	
	<i>Subtotal</i>	525,000.00	475,000.00	90.48	1	1	(Laporan)	100	
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum								
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	956 Layanan BMN	525,000.00	503,000.00	95.81	1	1	(Layanan)	100	
	994 Layanan Perkantoran	138,234,000.00	111,231,365.00	80.47	1	1	(Layanan)	100	
	<i>Subtotal</i>	138,759,000.00	111,734,365.00	88.14	2	2	(Layanan)	100	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	440,000.00	430,000.00	97.73	1	1	(Dokumen)	100	
	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,320,000.00	3,222,500.00	97.06	1	1	(Dokumen)	100	
	955 Layanan Manajemen Keuangan	100,000.00	100,000.00	100	1	1	(Dokumen)	100	
	<i>Subtotal</i>	3.860.000,00	3.752.500,00	98.26	3	3	(Dokumen)	100	
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM								
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	957 Layanan Hukum	610,000.00	565,000.00	92.62	1	1	(Laporan)	100	
	962 Layanan Umum	69,836,000.00	61,040,129.00	87.4	1	1	(Dokumen)	100	
	<i>Subtotal</i>	70.446.000,00	61.605.129,00	90.01	2	2	(Laporan)	100	

F.5 Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel F.4 Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Program/Kegiatan/ Rincian Output	RO PN/ti dak	Tar get	Satuan	Capaian Target		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(angka)	%		(Rp)	%
7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan								
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga								
002 Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	PN	1	Laporan	1	100%	11.180.000	9.651.500	85,52

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR 686126

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 8:56 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	228,430,000	190,682,994	(37,747,006)	83	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	228,430,000	190,682,994	(37,747,006)	83	0	0	0	0
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR 686126

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 8:56 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	228,430,000	190,682,994	(37,747,006)	83	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Batusangkar, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Sekretariat



HARMESYONI
197511182002121002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 0800 **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 686126 **SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 9:25 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	50,322,000	45,636,000	32,255,240	0	32,255,240	70.68	13,380,760
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	4,470,000	9,156,000	9,156,000	0	9,156,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,782,000	23,782,000	23,575,000	0	23,575,000	99.13	207,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	78,574,000	78,574,000	64,986,240	0	64,986,240	82.71	13,587,760
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,055,000	5,055,000	4,619,000	0	4,619,000	91.37	436,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,055,000	5,055,000	4,619,000	0	4,619,000	91.37	436,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	4,500,000	4,500,000	3,524,000	0	3,524,000	78.31	976,000
522113	Belanja Langganan Air	1,050,000	1,050,000	194,600	0	194,600	18.53	855,400
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,150,000	9,150,000	7,318,600	0	7,318,600	79.98	1,831,400
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34,540,000	34,540,000	34,500,000	0	34,500,000	99.88	40,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19,570,000	19,570,000	8,026,525	0	8,026,525	41.01	11,543,475
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	54,110,000	54,110,000	42,526,525	0	42,526,525	78.59	11,583,475
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73,821,000	73,821,000	63,797,629	0	63,797,629	86.42	10,023,371
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,700,000	6,700,000	6,585,000	0	6,585,000	98.28	115,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,020,000	1,020,000	850,000	0	850,000	83.33	170,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	81,541,000	81,541,000	71,232,629	0	71,232,629	87.36	10,308,371
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	228,430,000	228,430,000	190,682,994	0	190,682,994	83.48	37,747,006
	JUMLAH BELANJA	228,430,000	228,430,000	190,682,994	0	190,682,994	83.48	37,747,006

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 0800 **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 686126 **SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 9:25 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 8:15 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	50,322,000	45,636,000	32,255,240	0	32,255,240	70.68	13,380,760
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	4,470,000	9,156,000	9,156,000	0	9,156,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,782,000	23,782,000	23,575,000	0	23,575,000	99.13	207,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	78,574,000	78,574,000	64,986,240	0	64,986,240	82.71	13,587,760
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,055,000	5,055,000	4,619,000	0	4,619,000	91.37	436,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	5,055,000	5,055,000	4,619,000	0	4,619,000	91.37	436,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	4,500,000	4,500,000	3,524,000	0	3,524,000	78.31	976,000
522113	Belanja Langganan Air	1,050,000	1,050,000	194,600	0	194,600	18.53	855,400
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,150,000	9,150,000	7,318,600	0	7,318,600	79.98	1,831,400
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34,540,000	34,540,000	34,500,000	0	34,500,000	99.88	40,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19,570,000	19,570,000	8,026,525	0	8,026,525	41.01	11,543,475
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	54,110,000	54,110,000	42,526,525	0	42,526,525	78.59	11,583,475
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73,821,000	73,821,000	63,797,629	0	63,797,629	86.42	10,023,371
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,700,000	6,700,000	6,585,000	0	6,585,000	98.28	115,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,020,000	1,020,000	850,000	0	850,000	83.33	170,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	81,541,000	81,541,000	71,232,629	0	71,232,629	87.36	10,308,371
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	228,430,000	228,430,000	190,682,994	0	190,682,994	83.48	37,747,006
	JUMLAH BELANJA	228,430,000	228,430,000	190,682,994	0	190,682,994	83.48	37,747,006

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
SATUAN KERJA : 686126

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 06/05/26 9:27 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	3,460,000	3,460,000	3,354,500	0	3,354,500	96.95	105,500
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	11,180,000	11,180,000	9,561,500	0	9,561,500	85.52	1,618,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CQ	14,640,000	14,640,000	12,916,000	0	12,916,000	88.22	1,724,000
WA	Program Dukungan Manajemen							
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	200,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	525,000	525,000	475,000	0	475,000	90.48	50,000
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	142,619,000	142,619,000	115,486,865	0	115,486,865	80.98	27,132,135
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	70,446,000	70,446,000	61,605,129	0	61,605,129	87.45	8,840,871
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	213,790,000	213,790,000	177,766,994	0	177,766,994	83.15	36,023,006
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	228,430,000	228,430,000	190,682,994	0	190,682,994	83.48	37,747,006
	JUMLAH	228,430,000	228,430,000	190,682,994	0	190,682,994	83.48	37,747,006

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 115010800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 686126 **SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 9:29 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01 4355 EBD 52 5212 521211	RUPIAH MURNI Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	200,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	200,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	200,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4355.EBD	200,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4355	200,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
4356 EBA 52 5212 521211	Pengelolaan Data dan Informasi Layanan Dukungan Manajemen Internal BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	525,000	525,000	475,000	0	475,000	90.48	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	525,000	525,000	475,000	0	475,000	90.48	50,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	525,000	525,000	475,000	0	475,000	90.48	50,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4356.EBA	525,000	525,000	475,000	0	475,000	90.476	50,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4356	525,000	525,000	475,000	0	475,000	90.48	50,000
5245 BAH 52 5212 521211	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Pelayanan Publik Lainnya BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	200,000	200,000	178,500	0	178,500	89.25	21,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	200,000	200,000	178,500	0	178,500	89.25	21,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	200,000	200,000	178,500	0	178,500	89.25	21,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5245.BAH	200,000	200,000	178,500	0	178,500	89.25	21,500
BIC 52 5241 524111	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,260,000	3,260,000	3,176,000	0	3,176,000	97.42	84,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,260,000	3,260,000	3,176,000	0	3,176,000	97.42	84,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 115010800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 686126 **SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 9:29 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,260,000	3,260,000	3,176,000	0	3,176,000	97.42	84,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5245.BIC	3,260,000	3,260,000	3,176,000	0	3,176,000	97.423	84,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN5245	3,460,000	3,460,000	3,354,500	0	3,354,500	96.95	105,500
6849 EBA 52	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum Layanan Dukungan Manajemen Internal BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	50,322,000	45,636,000	32,255,240	0	32,255,240	70.68	13,380,760
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	4,470,000	9,156,000	9,156,000	0	9,156,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,782,000	23,782,000	23,575,000	0	23,575,000	99.13	207,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	78,574,000	78,574,000	64,986,240	0	64,986,240	82.71	13,587,760
5212 521211	Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	525,000	525,000	503,000	0	503,000	95.81	22,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	525,000	525,000	503,000	0	503,000	95.81	22,000
5221 522111 522113	Belanja Jasa Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Air	4,500,000 1,050,000	4,500,000 1,050,000	3,524,000 194,600	0 0	3,524,000 194,600	78.31 18.53	976,000 855,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	5,550,000	5,550,000	3,718,600	0	3,718,600	67	1,831,400
5231 523111 523121	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34,540,000 19,570,000	34,540,000 19,570,000	34,500,000 8,026,525	0 0	34,500,000 8,026,525	99.88 41.01	40,000 11,543,475
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	54,110,000	54,110,000	42,526,525	0	42,526,525	78.59	11,583,475
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	138,759,000	138,759,000	111,734,365	0	111,734,365	80.52	27,024,635
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6849.EBA	138,759,000	138,759,000	111,734,365	0	111,734,365	80.524	27,024,635
EBD 52 5212 521211	Layanan Manajemen Kinerja Internal BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	640,000	640,000	622,000	0	622,000	97.19	18,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	640,000	640,000	622,000	0	622,000	97.19	18,000
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,220,000	3,220,000	3,130,500	0	3,130,500	97.22	89,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,220,000	3,220,000	3,130,500	0	3,130,500	97.22	89,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 115010800KD **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 686126 **SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 9:29 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,860,000	3,860,000	3,752,500	0	3,752,500	97.22	107,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6849.EBD	3,860,000	3,860,000	3,752,500	0	3,752,500	97.215	107,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN6849	142,619,000	142,619,000	115,486,865	0	115,486,865	80.98	27,132,135
6850 EBA 52 5212 521211	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Layanan Dukungan Manajemen Internal BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	2,270,000	2,270,000	2,109,000	0	2,109,000	92.91	161,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,270,000	2,270,000	2,109,000	0	2,109,000	92.91	161,000
5221 522151	Belanja Jasa Belanja Jasa Profesi	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
5241 524111 524113 524114	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60,856,000 2,700,000 1,020,000	60,856,000 2,700,000 1,020,000	52,346,129 2,700,000 850,000	0 0 0	52,346,129 2,700,000 850,000	86.02 100 83.33	8,509,871 0 170,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	64,576,000	64,576,000	55,896,129	0	55,896,129	86.56	8,679,871
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	70,446,000	70,446,000	61,605,129	0	61,605,129	87.45	8,840,871
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6850.EBA	70,446,000	70,446,000	61,605,129	0	61,605,129	87.45	8,840,871
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN6850	70,446,000	70,446,000	61,605,129	0	61,605,129	87.45	8,840,871
7014 QIC 52 5212 521211	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan Pengawasan dan Pengendalian Lembaga BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	695,000	695,000	531,500	0	531,500	76.47	163,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	695,000	695,000	531,500	0	531,500	76.47	163,500
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,485,000 4,000,000	6,485,000 4,000,000	5,145,000 3,885,000	0 0	5,145,000 3,885,000	79.34 97.13	1,340,000 115,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	10,485,000	10,485,000	9,030,000	0	9,030,000	86.12	1,455,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,180,000	11,180,000	9,561,500	0	9,561,500	85.52	1,618,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 7014.QIC	11,180,000	11,180,000	9,561,500	0	9,561,500	85.523	1,618,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 115
: 01
: 115010800KD
: 686126
: KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR
KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 9:29 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN7014	11,180,000	11,180,000	9,561,500	0	9,561,500	85.52	1,618,500
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	228,430,000	228,430,000	190,682,994	0	190,682,994	83.48	37,747,006
	JUMLAH BELANJA	228,430,000	228,430,000	190,682,994	0	190,682,994	83.48	37,747,006

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (686126) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 8:03 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	77,860,110	0	77,860,110	
Beban Pemeliharaan	42,526,525	0	42,526,525	
Beban Perjalanan Dinas	71,232,629	0	71,232,629	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : (01) **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : (0800) **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : (686126) **SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR**

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 8:03 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	191,619,264	0	191,619,264	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(191,619,264)	0	(191,619,264)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(191,619,264)	0	(191,619,264)	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(191,619,264)	0	(191,619,264)	0

Keterangan :

FINAL

Batusangkar, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat



HARMESYONI

197511182002121002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (686126) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:55 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(191,619,264)	0	(191,619,264)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	190,682,994	0	190,682,994	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(936,270)	0	(936,270)	0
EKUITAS AKHIR	(936,270)	0	(936,270)	0

Keterangan :

FINAL

Batusangkar, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat



HARMESYONI

197511182002121002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (686126) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:56 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	936,270	0	936,270	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	936,270	0	936,270	
JUMLAH KEWAJIBAN	936,270	0	936,270	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(936,270)	0	(936,270)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(936,270)	0	(936,270)	()
JUMLAH EKUITAS	(936,270)	0	(936,270)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	

Keterangan :

FINAL

Batusangkar, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat



197511182002121002 197511182002121002

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0800

SATUAN KERJA : 686126

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

Tgl. Cetak 05/05/2026 9:25 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (686126) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 9:24 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	936,270
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	190,682,994
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	33,095,510	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9,156,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	23,575,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,619,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,524,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	290,600	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,600,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34,500,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,026,525	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	63,797,629	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,585,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	850,000	0
JUMLAH			191,619,264	191,619,264

Keterangan :

FINAL

Batusangkar, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat



197511182002121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (686126) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 9:24 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	190,682,994
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	32,255,240	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	9,156,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,575,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	4,619,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,524,000	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	194,600	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34,500,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,026,525	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63,797,629	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,585,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	850,000	0
JUMLAH			190,682,994	190,682,994

Keterangan :

FINAL

Batusangkar, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat



197511182002121002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan: Oktober 2025

Kementerian/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Tgl No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-
115.01.2 686126/2025

Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (00 07) SUMATERA BARAT / KAB TANAH DATAR KPPN (011) Bukittinggi

Satuan Kerja : (686126) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

Alamat dan No Telp : Jalan Lurah nan Panjang Nomor 103 Batusangkar .
0752 72624

I Keadaan Perbukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp 0,00 Dan Nomor Buky terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Mitra & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP UP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HARMESYONI

197511182002121002 197511182002121002

KAB. TANAH DATAR, Oktober 2025

Bendahara Pengeluaran



SEDKI AMEDA

198407032005012006 198407032005012006

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: November 2025

Kementerian/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-
115 01 2.686126/2025

Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (08.07) SUMATERA BARAT / KAB. TANAH DATAR KPPN : (011) Bukittinggi

Saluan Kerja : (6886*26) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

Alamat dan No Telp : Jalan Lareh nan Panjang Nomor 103 Balusangkar , 0752 72824

- Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp 20.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00014/SSP/586126/2025

	Jenis Buk. Penikmatu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	0,00	120.150.356,00	100.150.356,00	20.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	120.150.356,00	100.150.356,00	20.000.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	0,00	120.150.356,00	100.150.356,00	20.000.000,00
	1. BP UP*)	0,00	115.215.329,00	95.215.329,00	20.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	2.155.027,00	2.155.027,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	20.000.000,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	20.000.000,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	20.000.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	20.000.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	20.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	20.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	20.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HARMESYONI

197511182002121002 197511182002121002

KAB. TANAH DATAR, 30 November 2025

Bendahara Pengeluaran



SEDKI AMEDA

198407032005012006 198407032005012006

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Tgl. No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA 115.01.2.686126/2025

Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (08.07) SUMATERA BARAT / KAB. TANAH DATAR KPPN (011) Bukittinggi

Satuan Kerja : (686126) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

Alamat dan No Telp : Jalan Lurah ran Panjang Nomor 103 Batusangkar , 0752 72624

1 Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor, 00032/DRPP/686126/2025

	Janis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	20.000.000,00	105.789.533,00	125.789.533,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Sane)	20.000.000,00	105.789.533,00	125.789.533,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	20.000.000,00	105.789.533,00	125.789.533,00	0,00
	1. BP UP*)	20.000.000,00	11.083.500,00	31.083.500,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	84.248.000,00	84.248.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	5.898.200,00	5.898.200,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	4.579.833,00	4.579.833,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (II.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

- 1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
- 2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
- 3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
- 4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HARMIESTONI

197511182002121002 197511182002121002

KAB. TANAH DATAR, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran

SEDNAMEDA

198407032005012006 198407032005012006

BUKU KAS UMUM

Periode Oktober 2025

Departemen/Lembaga	: (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi	: (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Propinsi/Kabupaten/Kota	: (08.07) SUMATERA BARAT / KAB. TANAH DATAR
Satuan Kerja	: (686126) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR
Tanggal, No SP DIPA	: 02 Desember 2024, DIPA-115.01.2.686126/2025
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja	: (52) Rp. 228.430.000,00
Tahun Anggaran	: 2025
KPPN	: (011) Bukittinggi

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARMESYONI
197511182002121002 197511182002121002

KAB. TANAH DATAR, 31 Oktober 2025

Bendahara Pengeluaran,



SEDKI AMEDA
198407032005012006 198407032005012006

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan September 2025			0,00
		-	0	0	0
		Jumlah	0	0	0

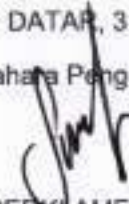

Kuasa Pengguna Anggaran

HARMESYONI

197511182002121002 197511182002121002

KAB. TANAH DATAR, 31 Oktober 2025

Bendahara Pengeluaran,


SEDN AMEDA

198407032005012006 198407032005012006

BUKU KAS UMUM

Periode November 2025

Departemen/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Propinsi/Kabupaten/Kota : (08.07) SUMATERA BARAT / KAB. TANAH DATAR
Satuan Kerja : (686126) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR
Tanggal, No SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-115.01.2.686126/2025
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (52) Rp. 228.430.000,00
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (011) Bukittinggi

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HARMESYONI

197511182002121002 197511182002121002

KAB. TANAH DATAR, 30 November 2025

Bendahara Pengeluaran,



SEOKI AMEDA

198407032005012006 198407032005012006



Bukti Penerimaan Negara

Billing 702512304164363

Tgl. Billing :
2025 -12-30 13:51:52

Pembuat Billing :
Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Tanah Datar
Sekretar

Tgl. Kadaluwarsa :
2026 -01-06 13:51:52

NPWP:
1000*****51

Nilai Billing :
IDR 12.781.500,00

KPPN:
(011) BUKITTINGGI

Status Billing :
Sudah dibayar

Satuan Kerja:
(686126) SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN
TANAH DATAR

Keterangan :
Setoran Sisa UP

Detil Billing	
Kode Akun	Nilai
815111	12.781.500,00

INFORMASI PEMBAYARAN

Bank Pembayar :
BANK NEGARA INDONESIA

Kanal Pembayar :
Internet Banking

Nama Pembayar :
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH
DATAR SEKRE TAR

NPWP15 :
N/A

NPWP16 :
N/A

NITKU :
N/A

Tanggal Dibayar :
2025 -12-30 14 :27:22

NTPN
99685397D99AL3GB

NTB
513479201135



Bukti Penerimaan Negara

Billing 702512304162225

Tgl. Billing :
2025 -12-30 12:42 :40

Pembuat Billing :
Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Tanah Datar
Sekretar

Tgl. Kadaluwarsa :
2026 -01-06 12:42 :40

NPWP:
1000*****51

Nilai Billing :
IDR 17.898.875,00

KPPN:
(011) BUKITTINGGI

Status Billing :
Sudah dibayar

Satuan Kerja:
(686126) SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN
TANAH DATAR

Keterangan :
Pengembalian Sisa TUP

Detil Billing	
Kode Akun	Nilai
815511	17.898.875,00

INFORMASI PEMBAYARAN

Bank Pembayar :
BANK NEGARA INDONESIA

Kanal Pembayar :
Internet Banking

Nama Pembayar :
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH
DATAR SEKRE TAR

NPWP15 :
N/A

NPWP16 :
N/A

NITKU :
N/A

Tanggal Dibayar :
2025 -12-30 13 :27 :17

NTPN
99C75522CUE3F1DH

NTB
994439116125

**MONITORING POSISI KAS (RUPIAH MURNI)
PER DESEMBER 2025**

KODE SATKER : 695128

NAMA SATKER : Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

No	BP	Saldo Rekening Koran Bank (RM) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Uang Tunai di Brankas Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Uang di BP Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	Jumlah Kas di BP	Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran di Neraca			Jumlah	Selisih	Keterangan Selisih	Tanggal Setor
							Sisa LS yang belum disetor/distribusi	Jasa Giro Yang Belum Disetor	Pajak Yang Belum Disetor				
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12=(6-11)	13	14
1	BP Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



MONITORING POSISI KAS (HIBAH)
PER DESEMBER 2025

KODE SATKER : 606126

NAMA SATKER : Bawasku Kabupaten Tanah Datar

No	BP	Saldo Rek Koran Bank (RM) Bawasku Kabupaten Tanah Datar	Uang Tunai di Brankas Bawasku Kabupaten Tanah Datar	Uang di BP Bawasku Kabupaten Tanah Datar	Jumlah Kas di BP	Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran di Neraca			Jumlah	Selisih	Keterangan Selisih
							Sisa L.S yang belum disetor/distribusi	Jasa Giro Yang Belum Disetor	Pajak Yang Belum Disetor			
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12=(8-11)	13
1	BP Bawasku Kabupaten Tanah Datar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Bawasku Kabupaten Tanah Datar
Ruang Kerja Umum

HARMETERNI, S.Ag. S.Pd
NIP. 197412142002121 002



REKAP BELANJA SEWA DIBAYAR DI MUKA
PER DESEMBER 2025

KODE SATKER : 889126
NAMA SATKER : Sewaktu Kabupaten Tanah Datar

NO	PROVINSI KABUPATEN/ KOTA	NAMA SEWA	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU SEWA	PERIODE		TANGGAL BAYAR	JUMLAH NILAI SEWA (Rp)	PERHITUNGAN BEBAN SEWA PER JANGKA WAKTU DALAM (BULAN)		SEWA DIBAYAR DI MUKA PER 30 Juni 2025	KET
						MULU	BERAKHIR			K	L = (K/J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L = (K/J)	M	N
1	Sewaktu Kabupaten Tanah Datar												
Jumlah													



REKAPITULASI HIBAH BARANG BAWASLU
PER DESEMBER 2025

KODE SATKER : 556126

NAMA SATKER : Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

No	Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nomor Register	Pendonor	No. NPHD	Tgl. NPHD	Nilai NPHD	No. BAST	Tgl. BAST	Nilai BAST	No. MPHLBJS	Tgl. MPHLBJS	No. Persetujuan MPHLBJS	Tgl. Persetujuan MPHLBJS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	Bawaslu Kabupaten Tanah Datar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**DAFTAR UTANG PIHAK KETIGA/TUNGGAKAN
PER DESEMBER 2025**

KODE SATKER : 686126

NAMA SATKER : Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

No	Penerima	Kode Akun	Untuk Pembayaran	Alasan Keterlambatan	Kontrak / Tagihan (jika ada)		Sumber Dana (Hibah/RM)	Jumlah
					Nomor	Tgl		
1	PDAM	522113	Belanja Air Bawaslu Kabupaten Tanah Datar No Pelanggan 130415000078 Periode Desember 2025	Belanja 2025 yg dibayar di 2026	-	-	RM	96.000
2	TELKOM	521111	Belanja Internet Bawaslu Kabupaten Tanah Datar No Pelanggan 111432108526 Periode Desember 2025	Belanja 2025 yg dibayar di 2026	4202512060068 61000000	08/01/2026	RM	840.270
JUMLAH								936.270

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
Kuasabendahara Anggaran



HANNESYONI, S.Ag., Pd
NIP. 19751118 200212 1 002

**DAFTAR PEROLEHAN LAINNYA
PER DESEMBER 2025**

KODE SATKER : 686126

NAMA SATKER : Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

No	Penerima	Nama Barang	Sumber Perolehan	Tanggal Penerimaan	Jumlah
1	-	-	-	-	-
JUMLAH					

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

Kuasa Pengantun Pengantun,



HARMESYONI, S.Ag. S.Pd.

NIP. 19754118 2002121 002

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga
 Eselon I
 Wilayah
 Satuan Kerja
 No. Dokumen
 Tanggal
 Tahun Anggaran
 Keterangan

: (115) Badan Pengawas Pemilihan Umum
 : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
 : (08.00) Kantor Daerah
 : (686126) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
 :01/686126/FMP/2025
 : 31 Desember 2025
 : Tahun 2025
 : penyesuaian tunggakan sesuai bill

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Di Muka
 ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 ☐ Belanja Dibayar Di Muka
 ☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
 ☐ Penyisihan Piutang
 ☐ Penghapusan Piutang
 ☐ Penyusutan Aset
 ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
 ☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
 ☐ Persediaan

☐ Koreksi Antar Beban
 ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
 ☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
 ☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
 ☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek
 ☐ Transfer Masuk
 ☐ Transfer Keluar
 ☐ Reklasifikasi Neraca
 ☐ Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
		522113	beban langganan air	96.000	
		212112	Belanja barang yg masih harus dibayar		96.000
			JUMLAH	96.000	96.000

Dibuat oleh : Operator SAKTI


 (Yuyun Sulistiyaningrum)

 Tanggal : 31 Desember 2025

Disetujui oleh : Kepala Sekretariat


 HARNIS YONI, S.Ag., S.Pd
 Nip. 19751118 200212 1 002
 Tanggal : 31 Desember 2025
 

Direkam oleh : Operator SAKTI


 (Yuyun Sulistiyaningrum)

 Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga
 Eselon I
 Wilayah
 Satuan Kerja
 No. Dokumen
 Tanggal
 Tahun Anggaran
 Keterangan

: (115) Badan Pengawas Pemilihan Umum
 : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
 : (08.00) Kantor Daerah
 : (686126) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
 : 02/686126/FMP/2025
 : 31 Desember 2025
 : Tahun 2025
 : penyesuaian tunggakan sesuai bill belanja langganan internet Bawaslu Kab. Tanah Datar

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Di Muka
 ☐ Koreksi Antar Beban

☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi

☐ Belanja Dibayar Di Muka
 ☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi

☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
 ☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang

☐ Penyisihan Piutang
 ☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek

☐ Penghapusan Piutang
 ☐ Transfer Masuk

☐ Penyusutan Aset
 ☐ Transfer Keluar

☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
 ☐ Reklasifikasi Neraca

☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
 ☐ Koreksi

☐ Persediaan

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
		521111	beban keperluan perkantoran	840.270	
		212112	Belanja barang yg masih harus dibayar		840.270
			JUMLAH	840.270	840.270

Dibuat oleh : Operator SAKTI


 (Yuyun Sulistiyaningrum)

 Tanggal : 31 Desember 2025

Disetujui oleh : Kepala Sekretariat


 HARMESYONI, S.A., S.Pd
 Nip. 1961118 200212 1 002
 Tanggal : 31 Desember 2025

Direkam ole : Operator SAKTI


 (Yuyun Sulistiyaningrum)

 Tanggal : 31 Desember 2025



Transaksi Berhasil

PDAM

Bukti Pembayaran Pdam

Waktu Transaksi 2026-01-22 14:51:49

Kd Area 1304 - Tanah Datar

Ref Number 1451253972

Nopel 130415000078

Nama Kantor Pengadilan

Bulan 12

Tagihan Rp 93,500

Biaya Adm Rp 2,500

Nilai Rp 96,000

Transaksi Sukses

Simpan Resi Ini Sebagai Bukti

Pembayaran Yang Sah

Bila Ada Keluhan Hub 0751-24444

TERIMA KASIH

INFORMASI BIAYA PENGGUNAAN **TELKOM Solution**
TELKOM Solution BILLING STATEMENT

NPWP/PKP : 0010000131093000

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420260106006861260001
NPWP. NPWP :
CIDNAS. Customer ID :
Nomor Account. Account Number : **686126**
Bulan Tagihan. Billing Month : Januari 2026
Tanggal Akhir Pembayaran. Due Date : 20 Januari 2026*)

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR

TOTAL TAGIHAN **RP** **840.270**
CHARGE

ABONEMEN	Rp	687.000
SELULER	Rp	0
LOKAL	Rp	0
SLJJ	Rp	0
INTERLOKAL	Rp	0
SLI	Rp	0
LAIN_LAIN	Rp	70.000
JASNITA	Rp	0
TKNET	Rp	0
PPN	Rp	83.270
Tagihan Bulan Ini	Rp	840.270
Saldo Terutang	Rp	0
METERAI	Rp	0

TERBILANG

Amount in Words

Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah
Eight Hundred Forty Thousand Two Hundred Seventy Rupiah

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak yang berlaku

Jakarta, 06 Januari 2026

Satker Name: SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor Rekening: 1201-01-000014-30-3
BANK BRI AN : PT. TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
CABANG : 01201 KK MENARA KEBON SIRIH



Rahmalia Dini Putranti

SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

Catatan. Note:

- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021, Kuitansi ini berlaku sebagai Faktur Pajak PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk NPWP/PPKP: 0010000131093000, Jl. Japati No. 1 Bandung
- Based on the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-16/PJ/2021, this billing receipt is certified as tax form of PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk. NPWP/PPKP: 0010000131093000, Jl. Japati No. 1 Bandung
- Abaikan informasi tagihan ini apabila anda sudah melakukan pembayaran
- Please ignore this billing statement if you have already settled your monthly bill

DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS NAMA : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR
BULAN : Januari 2026
JASA TELEKOMUNIKASI

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TELKOM REGIONAL II JABAR
AREA JAKARTA

DEPARTEMEN : OTDA
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TANAH DATAR
UNIT ORGANISASI : PEMERINTAHAN
SERVIS AREA : JAKARTA

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420260106006861260001

No	NO. LAYANAN	PERIODE	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJJ	INTER LOKAL	SLI	LAIN- LAIN	JASNITA	TKNET	TAGIHAN	PPN	METERAI	JML TAGIHAN
1	111432108526	202601	SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	687.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	757.000	83.270	0	840.270
Total				687.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	757.000	83.270	0	840.270

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :

Menerangkan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 840.270
(Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

SETUJU DAN SEGERA DISELESAIKAN PEMBAYARANNYA

Jakarta, 06 Januari 2026

Rincian tagihan disiapkan oleh
RAHMALIA DINI PUTRANTI
SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

**BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
PERIODE SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025**

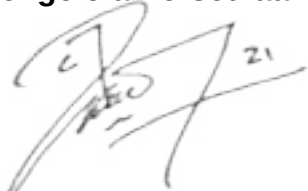
Nomor: 006/PL.09/SB-12/12/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan **Stock Opname** barang Persediaan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar periode Semester II, dengan data terlampir :

No	Kode	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Demikian Berita Acara *Stock Opname* Barang Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengelola Persediaan



Rafki Gemaya Putra, A.Md
NIP. 200006212025051003

PIC Persediaan



Beny Satria, SE
NIP. 19810212 200501 1 007

Mengetahui,
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar



HARMESYONI, S.Ag.,S.Pd
NIP.19751118 200212 1 002

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TRIWULAN IV TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (686126) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar
Kode dan Nama UAPPAW : (686218) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kode dan Nama K/L : (115) Badan Pengawas Pemilihan Umum

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Ya
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?			Tidak
a.	Pagu/DIPA		✓	Tidak

	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materi dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak

2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Tidak
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Tidak
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		√	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		√	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya

4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito			Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		√	Tidak
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		√	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ya/Tidak

	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		√	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  (Harmesyon, S.Ag.,S.Pd) NIP 19751118 200212 1 002		Batusangkar, 13 Februari 2025 Penelaah,  (Yuyun Sulistyaningrum, A.Md.Bns.) NIP 200106092025052007		